

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi belanja modal pada provinsi di pulau sumatera periode 2017 – 2021 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.
2. Variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana hibah (grants) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima. Dana yang didapat pemerintah daerah dari DAU akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah, melengkapi serta memperbaiki sarana dan prasarana daerah. Sehingga besar kecilnya DAU mempengaruhi seberapa banyak perbaikan serta pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan

4. lingkungan. DAK yang diperoleh tersebut ditunjukkan untuk program nasional yang tidak ada hubungannya dengan belanja modal
5. Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. SiLPA juga merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA merupakan indikator efisiensi karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi. Pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan belanja modal, provinsi di pulau sumatera diharapkan dapat menggali potensi provinsi masing – masing untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
2. Dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) diharapkan pemerintah di provinsi pulau sumatera dapat mengalokasikannya ke belanja modal, supaya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan di daerahnya.
3. Kebijakan yang akan dilakukan provinsi di pulau sumatera terhadap realisasi belanja modal yang merupakan bentuk komitmen peningkatan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat dapat tercermin juga melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga, realisasi penerimaan dari dua bidang tersebut perlu terus ditingkatkan dan didorong untuk kesejahteraan masyarakat luas pada suatu daerah.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap belanja modal seperti pertumbuhan penduduk dan luas wilayah daerah

